REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

BerAKHLAK

@pt_semarang pt-semarang.go.id pt-semarang

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **H. BAMBANG MYANTO, SH., MH.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 06 November 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
Mahkamah Agung Republik Indonesia	
H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.	**H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**
NIP. 196805231992121002	**NIP. 195905111984031004**

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
TUJUAN 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan		
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%
	2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju.	96%
	3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	96%
	4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan *e-Court*.	96%
	5. Persentase perkara pidana pada Tingkat banding yang menggunakan *e- Berpadu*.	75%
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,81
TUJUAN 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	71,51
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01 BUA).	96,00
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03 BADILUM).	92,15
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01 BUA).	96,00
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03 BADILUM).	84,00
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,30

Jumlah anggaran untuk program kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 57.039.735.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 350.895.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 482.135.000,-
Total Anggaran Kegiatan Tahun 2025		Rp. 57.872.765.000,-

(Lima puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Semarang, 06 November 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 195905111984031004

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH